

(3) bahwa setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya. Selanjutnya pada Pasal 6 ditegaskan bahwa setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan.

Berbagai ketentuan tersebut di atas, dapat dipahami bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak hidup sehat bagi seluruh penduduk termasuk penduduk miskin dan tidak mampu, pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan sumber daya di bidang kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

Pada saat ini kondisi kesehatan masyarakat di Indonesia saat ini masih sangat memprihatinkan ditandai dengan masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) dan ini merupakan suatu problem kesehatan yang sampai saat ini belum dapat diatasi secara tuntas. Berdasarkan Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2007 Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia adalah 228 per 100.000 kelahiran hidup, dan pada tahun 2008 menjadi 235 per 100.000 kelahiran hidup, Angka Kematian Bayi (AKB) 34 per 1000 kelahiran hidup, dan Angka Kematian Neonatus (AKN) 19 per 1000 kelahiran hidup.¹ Berdasarkan Kesepakatan global *Millenium Development Goals* (MDG's 2000) pada tahun 2015, diharapkan Angka Kematian Ibu (AKI) menurun dari

¹SDKI (Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia), 2007, Online, Internet, 5 November 2011, www.menegpp.go.id/aplikasidata/index.php?option=com

**HAK DAN KEWAJIBAN TENAGA KESEHATAN DALAM
PELAKSANAAN PERMENKES RI NO. 631/MENKES/III/2011
TENTANG JAMINAN PERSALINAN
(STUDI KASUS DI RSUD SUNAN KALIJAGA DEMAK)**

TESIS

Untuk memenuhi sebagian persyaratan

Mencapai derajat sarjana S-2

Program Studi Magister Ilmu Hukum
Konsentrasi Hukum Kesehatan



Diajukan oleh
Machfudloh

NIM: 09.930062



Kepada

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

SEMARANG

2012

	PERPUSTAKAAN
NO. INV : 252/S ₂ /MHK/CG	
TGL : 8/6/12	
PARAF : 	

TESIS
HAK DAN KEWAJIBAN TENAGA KESEHATAN DALAM
PELAKSANAAN PERMENKES RI NO. 631/MENKES/III/2011
TENTANG JAMINAN PERSALINAN
(STUDI KASUS DI RSUD SUNAN KALIJAGA DEMAK)

Diajukan oleh
Machfudloh
NIM: 09.93.0062

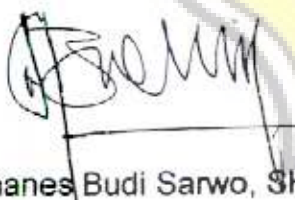
Telah disetujui oleh:

Pembimbing Utama


dr. Sofwan Dahlan, Sp(F)

Tanggal,.....

Pembimbing Pendamping


Yohanes Budi Sarwo, SH.MH

Tanggal,.....

PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER HUKUM KESEHATAN

Jl. Pawiyatan Luhur IV/1 Bendan Duwur Semarang 50234
Telp. (024) 8441555 (hunting) Fax. (024) 8415429 - 8445265
e-mail: humas@unika.ac.id



PENGESAHAN

Tesis di susun oleh :

Nama : MACHFUDLOH

Nim : 09.93.0062

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada hari / tanggal : Senin, 19 Maret 2012

Susunan Dewan Penguji

Dosen Penguji :

1. Dr. Endang Wahyati Y, SH., MH

2. dr. Sofwan Dahlan, SpF(K)

3. Y. Budi Sarwo, SH., MH

Tesis ini telah diterima sebagai satu persyaratan untuk memperoleh gelar dalam pendidikan akademik Strata 2 Magister Hukum Kesehatan.

Pada hari / tanggal : Senin, 19 Maret 2012

(Prof. Dr. A. Widanti S, SH., CN)

Ketua Program Pascasarjana
Magister Hukum

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Dengan mengucapkan puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan judul " **HAK DAN KEWAJIBAN TENAGA KESEHATAN DALAM PELAKSANAAN PERMENKES RI NO.631/MENKES/III/2011 TENTANG JAMINAN PERSALINAN DI RSUD SUNAN KALIJAGA DEMAK**".

Program Jampersal merupakan bagian dari upaya pencapaian target *Millenium Development Goals* (MDG's) untuk menekan angka kematian ibu dan anak saat melahirkan. Jaminan Persalinan adalah jaminan pembiayaan pelayanan persalinan yang meliputi pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasuk pelayanan KB paska persalinan dan pelayanan bagi bayi baru lahir. Tujuan dari Jaminan persalinan adalah meningkatnya akses terhadap pelayanan persalinan yang dilakukan oleh dokter atau bidan dalam rangka menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB). Kehadiran Jampersal merupakan solusi bagi masyarakat, terutama rakyat miskin untuk mendapatkan pelayanan kesehatan khususnya dalam hal melahirkan. Disamping itu, tenaga kesehatan (dokter dan bidan) merupakan sumber daya utama pemberi pelayanan kesehatan kepada

masyarakat. Dan mempunyai peranan yang penting karena terkait langsung dengan pemberian pelayanan kesehatan dan mutu pelayanan yang diberikan, pada peserta jampersal. Untuk itu dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Kesehatan No:631/MENKES/PER/III/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan diatur tentang Hak dan kewajiban Tenaga kesehatan dalam upaya mendukung mutu pelayanan yang diberikan sehingga tujuan pembangunan kesehatan tercapai.

Terselesaikannya Tesis ini tidak lepas dari bimbingan dan dorongan serta bantuan baik moril maupun materil dari semua pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih Kepada :

1. Prof. Dr. A. Widanti, SH, CN, selaku Ketua Program Studi Magister ilmu Hukum Unika Soegijapranata Semarang
2. Endang Wahyati, SH, MH, selaku Sekretaris Program Studi Magister ilmu Hukum Unika Soegijapranata Semarang dan selaku dosen penguji yang telah memberikan masukan dalam penulisan tesis ini
3. Dr. Sofwan dahlan, SpF, selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan hingga terselesaikannya penulisan tesis ini
4. Yohanes Budi sarwo, SH, MH, selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan kesempatan kepada penulis untuk mendapatkan bimbingan, pengarahan, dorongan semangat, masukan serta bantuan

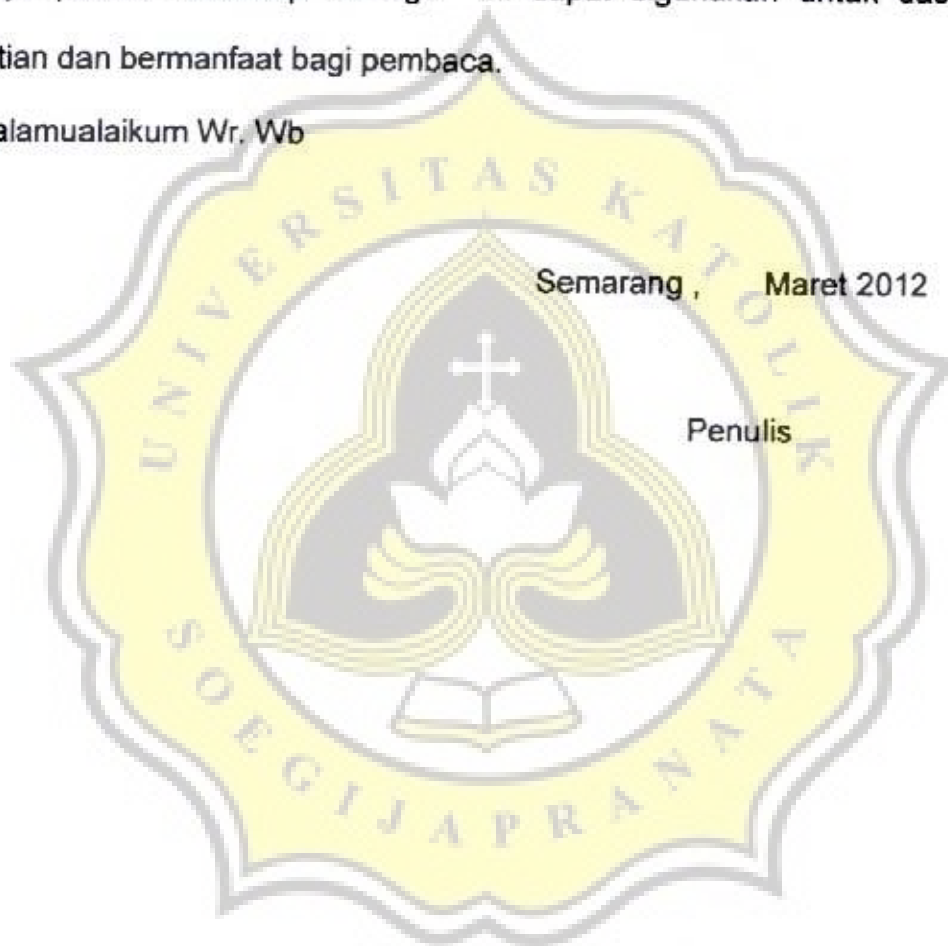
atas kesabarannya untuk mengarahkan penulis dalam menyelesaikan tesis

5. Kepala RSUD Sunan Kalijaga Kabupaten Demak dan jajarannya yang telah banyak membantu dan kerjasamanya yang baik selama dalam proses penelitian.
6. Seluruh Staf pengajar Program Studi Magister ilmu Hukum Unika Soegijapranata Semarang
7. Rekan-Rekan angkatan XII Program Studi Magister ilmu Hukum Unika Soegijapranata Semarang khususnya angkatan XII tahun 2010 Semarang, atas segala bantuannya untuk selalu bersedia saling berbagi suka duka, pengalaman, ilmu pengetahuan dan memberi dorongan semangat serta kerjasamanya yang baik selama menempuh pendidikan pada Program Studi Pasca Sarjana Magister Hukum Kesehatan Universitas Khatolik Soegijapranata Semarang.
8. Orang tua handa tercinta yang telah merawat, membesarkan dan memberikan dorongan serta dukungannya yang tak ternilai harganya kepada penulis dan jasanya tidak akan terlupakan serta adik-adikku yang telah memberikan dorongan moril dan doa semuanya sehingga tesis ini dapat selesai dengan baik.
9. Semua keluarga, rekan-rekan sejawat, sahabat, dan Aufklarungku yang selalu mendampingi dan memberikan support dalam penyusunan tesis ini, serta semua pihak yang tidak dapat penulis

sebutkan satu persatu, yang turut serta memberikan nasehat, kritik dan saran serta semangat, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

Semoga jasa dan amal baik yang telah diberikan kepada penulis mendapat pahala dari Allah SWT sesuai dengan amal Kebaikannya . Akhirnya penulis berharap semoga ini dapat digunakan untuk dasar penelitian dan bermanfaat bagi pembaca.

Wassalamualaikum Wr. Wb



Semarang , Maret 2012

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
HALAMAN PERNYATAAN.....	xii
ABSTRAK.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian.....	9

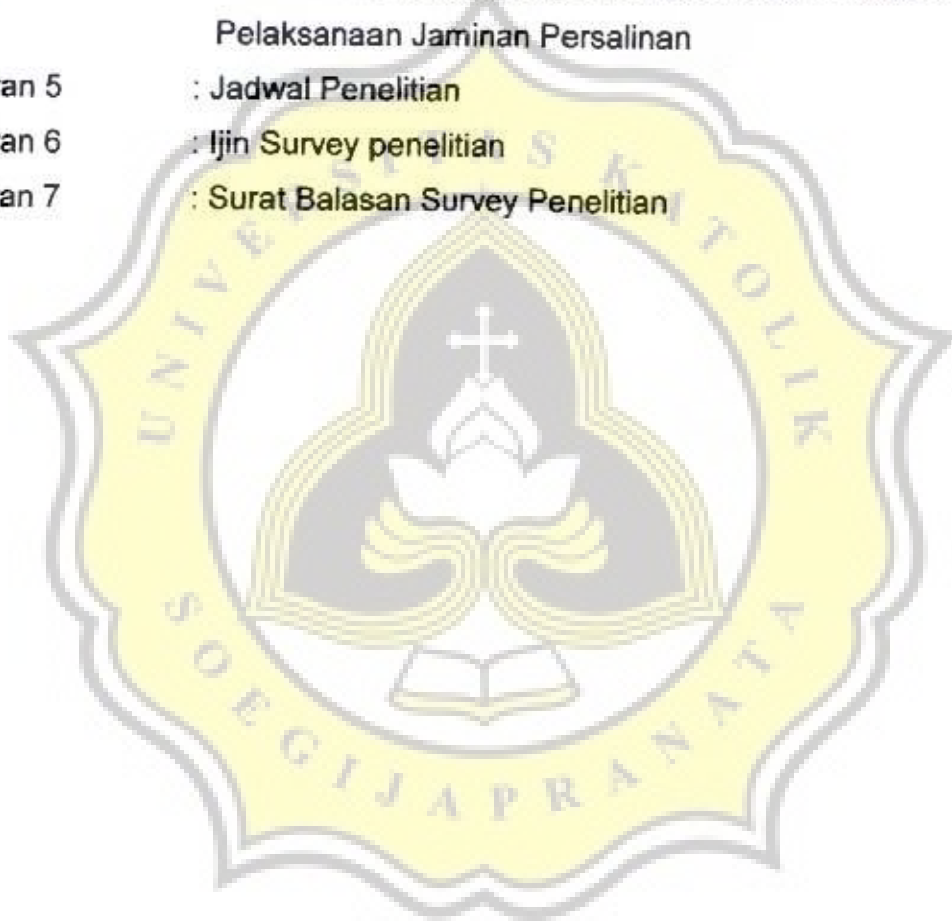
	F. Penyajian Tesis	22
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA	
	A. Sistem Jaminan Kesehatan Di Indonesia	26
	B. Permenkes RI No. 631/Menkes/III/2011 tentang jaminan persalinan.....	44
	C. Tenaga Kesehatan	55
	D. Ketentuan Hukum Hak dan Kewajiban Tenaga Kesehatan	61
	E. Bidan	67
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Hasil Penelitian.....	79
	B. Pembahasan	107
BAB IV	PENUTUP	
	A. Simpulan.....	154
	B. Saran.....	156
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

- Tabel 2.1 : Penurunan AKI (Angka Kematian Ibu) di Indonesia.
Hlm.36
- Tabel 2.2 : Persentase Distribusi penduduk yang terlindungi oleh Berbagai Macam Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Berdasarkan Latar Belakang. Hlm. 46
- Tabel 2.3 : Besaran Tarif Pelayanan Jaminan Persalinan Pada Pelayanan Tingkat Pertama. Hlm.50
- Tabel 3.1 : Jenis Tenaga Kesehatan Hlm. 78
- Tabel 3.2 : Jenis Ruang Inap Hlm. 79
- Tabel 3.3 : Hasil tabulasi tentang Prosedur Jaminan Persalinan Hlm. 82
- Tabel 3.4 : Hasil tabulasi tentang kewajiban Nakes dalam pelaksanaan Jaminan Persalinan. Hlm. 85
- Tabel 3.5 : Hasil tabulasi tentang hak Nakes dalam pelaksanaan Jaminan Persalinan Hlm. 86
- Tabel 3.6 : Hasil tabulasi tentang hambatan-hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan Jaminan Persalinan Hlm. 87

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Tabulasi Prosedur Pelaksanaan Jaminan Persalinan
- Lampiran 2 : Tabulasi Kewajiban Nakes dalam Pelaksanaan Jaminan Persalinan
- Lampiran 3 : Tabulasi hak Nakes dalam Pelaksanaan Jaminan Persalinan
- Lampiran 4 : Tabulasi Hambatan yang ditemukan dalam Prosedur Pelaksanaan Jaminan Persalinan
- Lampiran 5 : Jadwal Penelitian
- Lampiran 6 : Ijin Survey penelitian
- Lampiran 7 : Surat Balasan Survey Penelitian



PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya, Machfudloh, Peserta Program Studi Magister Hukum Kesehatan, Nim 09.930062,

Menyatakan :

1. Bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi.
2. Bahwa sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar Pustaka.

Demikian pernyataan ini dibuat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang,



Machfudloh

ABSTRAK

Berdasarkan Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2007 Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia adalah 228 per 100.000 kelahiran hidup, dan pada tahun 2008 menjadi 235 per 100.000 kelahiran hidup, sedangkan Angka Kematian Bayi (AKB) di Indonesia 34 per 1000 kelahiran hidup. Berdasarkan Kesepakatan global *Millenium Development Goals* (MDG's 2000) pada tahun 2015, diharapkan Angka Kematian Ibu (AKI) menurun dari 228 pada tahun 20007 menjadi 102 per 100.000 KH. Berbagai upaya pemerintah untuk menurunkan AKI dan mendukung tercapainya MDG's salah satunya adalah dengan dikeluarkannya PERMENKES RI NO. 631/MENKES/III/2011 tentang Program Jampersal (Jaminan Persalinan).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris/sosiologis, dengan spesifikasi deskriptif analitis yaitu untuk mengelompokkan, menghubungkan dan memberi makna terhadap data yang berkaitan dengan hak dan kewajiban tenaga kesehatan dalam pelaksanaan Permenkes RI No 631/MENKES/III/2011 tentang Jaminan Persalinan di RSUD Sunan Kalijaga.

Hasil penelitian ini bahwa prosedur pelaksanaan PERMENKES RI NO. 631/MENKES/III/2011 tentang Program Jampersal di RSUD Sunan Kalijaga Demak belum dilakukan sesuai prosedur, dimana ruang lingkup dan paket manfaat jampersal selain pelayanan pada ibu hamil, bersalin, nifas, dan bayi dengan resiko tinggi dan komplikasi juga memberikan pelayanan normal yang seharusnya diberikan pada pelayanan tingkat pertama, selain itu fasilitas pelayanan maupun sumberdaya manusia tenaga medis dalam memberikan pelayanan pasien masih kurang karena peserta yang menggunakan jampersal mengalami peningkatan setiap harinya. Dalam memberikan pelayanan kesehatan tenaga kesehatan bekerja sesuai dengan kewajibannya yaitu memberikan pelayanan baik pada ibu maupun pada bayi, namun hak yang didapatkan tenaga kesehatan belum seimbang dengan kewajibannya dimana jumlahnya sudah tidak utuh lagi melainkan karena ada potongan. Adapun hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan PERMENKES RI NO. 631/MENKES/III/2011 tentang Program Jampersal di RSUD Sunan Kalijaga Demak adalah dari pihak Rumah sakit dan dari pihak pasien. Hambatan dari pihak RS yaitu SDM tenaga medis masih kurang serta sarana prasarana dan peralatan yang masih kurang. Sedangkan hambatan dari pihak pasien karena minimnya pengetahuan dan kurangnya sosialisasi baik dari pemerintah maupun tenaga kesehatan tentang program jampersal sehingga dalam melengkapi persyaratan pasien mengalami banyak kendala.

Kata kunci: Hak dan Kewajiban, tenaga kesehatan, program JAMPERSAL.

ABSTRACT

Based on the Indonesia Demographic and Health Survey (IDHS) 2007, Maternal Mortality Rate (MMR) in Indonesia is 228 per 100,000 live births, and in 2008 to 235 per 100,000 live births, while infant mortality rate (IMR) in Indonesia 34 per 1000 births of life. Under the global agreement of the Millennium Development Goals (MDG's 2000) in 2015, is expected to Maternal Mortality Rate (MMR) declined from 228 in 20 007 to 102 per 100,000 KH. Government efforts to reduce maternal mortality and support the achievement of MDG's one of them is by the release of NO Permenkes RI. 631/MENKES/III/2011 about Jampersal Program (Labor Warranty).

The method used in this study is the juridical empirical / sociological, with specification of descriptive analysis is to classify, correlate and give meaning to the data relating to the rights and duties of health personnel in the implementation of Decree No. Permenkes 631/MENKES/III/2011 Maternity Coverage in Sunan Kalijaga Hospital.

The results of this study that the implementation procedures Permenkes RI NO. 631/MENKES/III/2011 Jampersal Program at the Hospital of the Sunan Kalijaga Demak has not done according to the procedure, in which the scope and benefits package in addition to service jampersal in pregnant women, maternity, childbirth, and infants with high risk of complications also provide normal services should given at the first level of service, in addition to service facilities and human resources of medical personnel in providing patient care still less for those who use jampersal increasing every day. In providing health services of health personnel working in accordance with its obligation of providing good service to the mother and the baby, but obtained the rights of health workers have not been balanced with the obligations which the numbers are no longer intact, but because there are pieces. The barriers are found in the implementation of RI Permenkes NO. 631/MENKES/III/2011 Jampersal Program at the Hospital of the Sunan Kalijaga Demak is part of the hospital and from the patient. The resistance of the RS is still lack of human resources and medical infrastructure and equipment are lacking. While the resistance of the patient due to lack of knowledge and lack of socialization both the government and health workers about the program so that the complete requirements jampersal patients experienced a lot of obstacles.

Keywords: Rights and Obligations, health workers, program JAMPERSAL.